

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan mengenai Prosedur Administrasi Perjalanan Dinas pada Instansi Pemerintah Pusat (IPP) di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur administrasi perjalanan dinas pada bidang IPP secara keseluruhan sudah mengikuti alur yang sistematis dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Prosedur ini dimulai dari tahapan pelaksanaan, sampai pelaporan melalui penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Penggunaan aplikasi Bisma juga sudah membantu dalam pengolahan data secara digital. Secara umum, prosedur administrasi perjalanan dinas pada Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku, namun masih memerlukan penyempurnaan pada aspek ketepatan waktu penyelesaian administrasi dan kelengkapan dokumen.
2. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi efisiensi kerja. Kendala tersebut meliputi aspek administratif yang meliputi ketidaklengkapan dokumen pendukung seperti kuitansi tanpa stempel dan bukti fisik transportasi yang hilang, serta kelalaian pegawai tugas di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa kendala yang terjadi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan dengan kedisiplinan dan juga koordinasi antar pihak yang terlibat.
3. Selain itu gambaran teknis juga menjadi catatan penting, terutama terkait dengan stabilitas jaringan pada Aplikasi Bisma yang terkadang mengalami

gangguan saat sinkronisasi data. Hal ini menyebabkan keterlambatan proses verifikasi dan validasi dokumen pertanggungjawaban.

4. Upaya penanganan yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Sumatera Barat telah berjalan cukup baik, dengan melakukan verifikasi berkas yang lebih akurat di awal serta peningkatan koordinasi antar pegawai untuk memastikan penyerahan laporan dilakukan tepat waktu sebelum batas akhir yang sudah ditentukan.

Secara keseluruhan pelaksanaan administrasi perjalanan dinas pada Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan sistematis, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek kedisiplinan pegawai, kelengkapan dokumen, stabilitas Aplikasi Bisma, serta pengawasan terhadap batas waktu penyerahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Kendala tersebut dapat berdampak pada keterlambatan pencairan anggaran, lemahnya pertanggungjawaban dokumen, serta potensi risiko temuan audit.

5.2 Saran

Jika dilihat dari kendala yang ditemukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi:

1. Bagi Pegawai Pelaksana

Meningkatkan kedisiplinan dan ketelitian dalam mengumpulkan serta menyimpan bukti-bukti pengeluaran selama perjalanan dinas. Pegawai juga diharapkan lebih konsisten dalam melakukan absensi *geotagging* sebagai bukti nyata kehadiran di lokasi tugas agar tidak menghambat proses administrasi kemudian hari.

2. Bagi Instansi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Diperlukan penguatan sistem pengawasan internal terhadap batas waktu penyerahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Pemberian sanksi administratif berupa teguran atau sanksi yang tegas bagi pegawai untuk lebih tertib administrasi. Selain itu, optimalisasi server aplikasi Bisma perlu diperhatikan agar tidak terjadi kendala teknis saat beban kerja meningkat.

3. Bagi Penulis Selanjutnya

Disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan mengkaji tingkat

efisiensi anggaran perjalanan dinas setelah penerapan sistem digitalisasi secara penuh, guna melihat sejauh mana penghematan efektivitas yang dihasilkan bagi negara.

